



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
INSTANSI PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LKPP
TAHUN 2013

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP Tahun 2013;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 106.01.1.970968/2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) INSTANSI PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LKPP TAHUN 2013.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LKPP Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP;
b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
c. Melaporkan hasil penilaian survei IKM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI

Tembusan:
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

↳

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM) INSTANSI PELAKSANA FUNGSI
PENGADAAN DI LUAR LKPP**

**NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 MARET 2013**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
INSTANSI PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LKPP TAHUN 2013**

Anggota : 1. (LPSE Provinsi Sulawesi Selatan)
: 2. (ULP Kabupaten Maros)
: 3. (Badiklat Kemenkeu Sulawesi Selatan)
: 4. (LPSE Kota Surabaya)
: 5. (ULP Kota Surabaya)
: 6. (LPPM Universitas Airlangga)
: 7. (LPSE Provinsi Jawa Barat)
: 8. (ULP Provinsi Jawa Barat)
: 9. (Badiklat Provinsi Jawa Barat)
: 10. (LPSE Provinsi Kalimantan Selatan)
: 11. (ULP Provinsi Kalimantan Selatan)
: 12. (Badiklat Provinsi Kalimantan Selatan)
: 13. (LPSE Kota Yogyakarta)
: 14. (ULP Kota Yogyakarta)
: 15. (Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta)

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI

✕

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) INSTANSI
PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LKPP TAHUN
2012**

**NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 MARET 2013**

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) LKPP
TAHUN 2013**

Kedudukan dalam Tim	Honor (Rp)
Anggota	400.000

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI

2